

STRATEGI CALON LEGISLATIF DALAM MERAH SUARA PADA PEMILU 2014

(Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1)

SKRIPSI

**DISUSUN
OLEH :**

MHD. DAHLAN TANJUNG
NIM : 118510030



**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/22

STRATEGI CALON LEGISLATIF DALAM MERAH SUARA PADA PEMILU 2014

(Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1)

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat Untuk Dapat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

**DISUSUN
OLEH :**

MHD. DAHLAN TANJUNG
NIM : 118510030

**PROGRAM STUDI KEPERMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Strategi Calon Legislatif Dalam Meraih Suara Pada Pemilu 2014 (Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat (Pipil 2 Sumut Nomor Urut 1))

Nama Mahasiswa : Mhd. Dahlan Tanjung

NIM : 11 851 0030

Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP
Pembimbing I

Anggraini Atmei, SH, M.Hum
Pembimbing II

Mengetahui



Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Langgah Lulus

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/22

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Dahlan Tanjung

Nim : 11 851 0030

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Strategi Calon Legislatif Dalam Meraih Suara Pada Pemilu 2014 (Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1)**” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan,

2016



Mhd. Dahlan Tanjung
NIM. 118510030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Dahlan Tanjung
Npm : 11 851 0030
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free-Rigth*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Strategi Calon Legislatif Dalam Meraih Suara Pada Pemilu 2014 (Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Oktober 2016

Penulis,



Mhd. Dahlan Tanjung
NIM. 118510030

ABSTRAK

Strategi Calon Legislatif Dalam meraih Suara Pada Pemilu 2014 (Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1)

H. Arifin Nainggolan, SH, M.Si yang maju pada pemilu legislative 2014 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1 yang memiliki daerah pemilihan Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Barat, Medan Helvetia, dan Medan Petisah, pastilah sudah menyiapkan sejumlah strategi pemenangan yang siap dijalankan, akan tetapi strategi pemenangan tersebut hanya disusun berdasarkan logika-logika sederhana tanpa menggunakan data-data pendukung sebagai pijakan awal untuk melahirkan sebuah konsep yang diwujudkan menjadi pola dan strategi pemenangan.

Dapat diketahui strategi politik yang dilakukan H. Arifin Nainggolan, SH, M.Si menjelang pemilu 2014 sudah cukup, karena H. Arifin Nainggolan, SH, M.Si telah memaksimalkan usahanya dalam mendekati diri pada masyarakat. Meskipun baik itu merupakan berbagai kegiatan sosial, menyusun program akar rumput, grebek pasar, dan melalui media, slogan. Prinsip bauran politik terutama menyangkut etika dan moralitas dalam dalam aplikasi bauran politik tak ubahnya seperti dunia bisniskapitalis beserta implikasinya yang sarat dengan manipulasi informasi. Berkembangnya iklan politik melalui media massa (pers, radio, televisi, dan media cetak lainnya), H. Arifin Nainggolan, SH, M.Si juga mampu mengarahkan massa dan mampu membentuk tim mulai dari tingkat Kecamatan sampai ketinggian Kelurahan.

Hendaknya calon legislatif memberi pembelajaran yang baik pada masyarakat dan mampu menjembatani setiap kendala-kendala dalam menjalankan program-program mulai dari tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Serta caleg harus mampu menjadi publik figure bagi masyarakat dan mampu mengayomi sesuai janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Disarankan kepada seluruh Tim Sukses khususnya yang berasal dari Partai Demokrat maupun membantu tugas-tugas Caleg terpilih sehingga mampu memudahkan visi misi Caleg sebagai pemenang dalam pemilu 2014.

Kata Kunci : Strategi Calon Legislatif dan Meraih Suara Pemilu 2014

ABSTRACT

Strategy Legislative Candidates In Achieving Vote In Election 2014 (Qualitative Descriptive Study of Democratic Party Dapil 2 Sumatera Number 1)

H. Arifin Nainggolan, SH, M.Si advanced to the 2014 legislative elections of the Democratic Party with the Number I which has Tuntungan electoral district of Medan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Barat, Medan Helvetia and Medan Petisah, must have prepared a winning strateu that is ready to run, will tetapidan only winning strateg,' is based on a simple logics without supporting data as a starting point to deliver a concept that is embodied into a pattern and winning strategies.

It can be seen in the political climate strateu H.Arifin Nainggolan, SH, MSi ahead of the 2014 elections was enough because H.Arifin Nainggolan, SH, MSi has to maximize its efforts in closer to the community. Although both perform a variety of social activities, menyusun grassroots program, grebek market and through the media, slogans. The principle of political hotchpotch especially regarding ethics and morality in politics mix application is like a capitalist business world and its implications is loaded with information manipulation. The development of political advertising through mass media (press, radio, television and print media), H.Arifin Nainggolan, SH, MSi, is also capable of leading the masses and able to form a team from the district level to the level Village.

Legislative Candidates should provide a good learning in the community and is able to bridge any obstacle in running programs ranging from sub-district and village level As well as the candidates should be able to become a public figure for the community and is able to protect in accordance promises delivered during the campaign. Suggested to the entire team success particularly from the Democratic Party is able to help with the chores candidates elected so as to facilitate the vision and mission of candidates as the winner in the 2014 elections.

Keywords: Legislative Strategies and Achieving Sound Candidate Election 2014

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya. Danun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan dilandasi i'tikat baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Strategi Calon Legislatif Dalam meraih Suara Pada Pemilu 2014 (Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1)”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. A. ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Prof. Dr. Arif Nasution, MA, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, MAP, selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Anggraini Atmei, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas do'a dan dukungannya. Juga kepada teman-teman khususnya stambuk *11 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 11 Oktober 2016
Penulis

MHD. DAHLAN TANJUNG
NPM. 11.851.0030

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah	5
1.3.Pembatasan Masalah.....	6
1.4.Perumusan Masalah.....	6
1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Strategi	8
2.1.1. Pemilihan Umum Legislatif	14
2.1.2. Tahap-Tahap Pemilihan Umum Legislatif1	17
2.2. Realisasi Strategi Politik.....	20
2.2.1. Realisasi Politik	21
2.2.2. Strategi Politik Untuk Memenangkan Pemilu.....	22
2.2.3. Teori Segmentasi	24
2.2.4. Teori Target Politik.....	26
2.2.5. Teori Posisi Politik	28
2.2.6. Bauran Produk Politik Kandidat Legislatif Dapil Sumut2	29

2.3. Kerangka Berfikir.....	33
-----------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data	34
3.1.1. Jenis Penelitian.....	35
3.1.2. Sumber Data.....	35
3.1.3. Waktu Penelitian	36
3.2. Teknik Pengumpulan Data	36
3.3. Analisis Data.....	37

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.2. Gambaran Partai Demokrat.....	38
4.1.3. Pengesahan Partai Demokrat.....	40
4.1.4. Deskripsi Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan	41
4.1.5. Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan.....	43
4.1.6. Visi dan Misi	44
4.2. Hasil Pembahasan	45
4.2.1. Membentuk Kepengurusan Hingga Akar Rumput	46
4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Calon DPRD Dapil 2 SUMUT	50
4.4. Pengaruh Figur Politik.....	54
4.5. Pertemuan-Pertemuan Terbatas diantara Pengurus Internal.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 59

5.2. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai Politik menurut Sigmund Newman (Budiarjo, 2008:404) adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain, demikian juga dengan keadaan partai politiknya yang memiliki banyak sekali variasi. Namun pada umumnya, partai politik di negara berkembang diharapkan juga melaksanakan fungsinya seperti di negara-negara yang sudah mapan kehidupan politiknya.

Partai Demokrat kini sedang berproses menjadi partai besar. Namun, popularitasnya yang sedang naik daun tidak bisa lepas dari bayang-bayang sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor Yudhoyono sangat menentukan keberadaan Partai Demokrat (PD). Jika dirunut, naiknya popularitas Partai Demokrat sejalan dengan peningkatan keterkenalan yang dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini menunjukkan bahwa citra Partai Demokrat sangat tergantung pada sosok yang juga merupakan pendiri partai berlambang bintang segitiga ini. Latar belakang berdirinya pun tidak lepas dari sisi karier politik Yudhoyono saat kalah saat pemilihan wakil presiden pada Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada juli 2001. Waktu itu mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada era Presiden Abdulrahman Wahid

(2000-2001) merupakan salah satu dari lima calon wakil presiden yang akan bersaing untuk dipilih oleh MPR guna mendampingi Presiden Megawati Soekarno Putri. Yudhoyono dicalonkan oleh salah satu fraksi di MPR, yakni fraksi Kesatuan Kebangsaan dan didukung pula oleh 90 anggota MPR dari utusan Golongan dan dari fraksi lainnya dari secara perseorangan.

Setelah Yudhoyono kalah, beberapa pendukungnya yang dimotori beberapa tokoh, seperti Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irzan Tandjung, dan Vence Rumangkang, sepakat untuk membuat partai politik baru. Partai ini digunakan sebagai kendaraan politik sebagai kendaraan politik bagi mantan Kepala Staf Teritorial TNI (1998-1999) itu untuk maju pada pemilihan presiden tahun 2004.

Berbagai rencana pertemuan pun dilakukan untuk mematangkan terbentuknya partai tersebut. Akhirnya, pada 9 september 2002 terbentuklah Partai Demokrat dengan ketua umum dipegang oleh Subur Budhisantoso. Tanggal dan bulan kelahiran partai pun disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran Yudhoyono.

Setelah dideklarasikan, jaringan ke daerah segera dilebarkan. Sampai akhir 2003 jaringan Partai Demokrat telah masuk di 32 provinsi. Dari sejumlah perwakilan daerah itu, 27 provinsi dinyatakan lulus dalam verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah ini tergolong tinggi dan dinilai oleh KPU sebagai partai yang mempunyai kelulusan verifikasi jaringan paling banyak.

Setelah pemilu 2004 digelar, kejutan mewarnai hasilnya. Partai Demokrat yang baru berusia tiga tahun langsung melejit, mampu berada di urutan papan tengah, sejajar dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah ada sebelumnya.

Melejitnya perolehan suara Partai Demokrat bahkan mampu menggerus perolehan suara partai-partai lama yang sudah eksisi. Jika dilacak dari karakteristik perolehan suara antar partai perdaerah tampak jelas hubungannya. Suara partau yang tergerus adalah dari PAN, PKB, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Daerah perkotaan merupaka arena Partai Demokrat untuk mengumpulkan suara lebih banyak dibandingkan dengan daerah perdesaan. Peran media massa dalam menyiarkan keberadaan Partai Demokrat yang merupakan “Partainya SBY” sangan besar. Tak ayal, partai-partai berbasis massa tradisionalyang tinggal di perkotaan, seperti PDI-P dan PAN lah yang terpengaruh.

Startegi pemenagan merupakan sebuah kebutuhan yang paling mendasar untuk memantapkan diri menjadi calon anggota legislative terpilih. Secara umum pola dan strategi pemenangan ini dapat dipastikan sudah dipersiapkan sejak awal oleh masing-masing anggota legislative tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga pusat, dengan tujuan angar bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya. Dalam proses penyusunan pola dan strategi pemenangan ini, para calon anggota legislative umumnya menitik beratkan pada upaya mobilisasi suara lewat money politik sebagaimana yang terjadi pada pemilu-pemilu legislative sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya, pola dan strategi ini tidak cukup efektif untuk mengantarkan calon yang bersangkutan menduduki kursi lembaga legislative. Pola dan strategi seperti ini sesungguhnya cenderung hanya membentuk masyarakat (pemilih) untuk berfikir praktis (politik transaksional) yang tidak hanya merugikan calon anggota legislative yang bersangkutan tetapi juga

merugikan masyarakat (pemilih). Sebagai contoh, banyak diantara caleg yang sudah mengeluarkan adana yang sangat besar, namun hanya mendapat suara kecil atau dalam arti kecil bahwa adana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah suara yang didapatkan.

Banyak diantara calon anggota legislative melakukan sosialisasi melalui diskusi, pertemuan maupun pemasangan stiker, baliho, dan kartu nama yang sebanyak-banyaknya, tanpa memahami karakter dan budaya masyarakat yang menjadi calon pemilihnya. Banyak diantara caleg terjebak pada hitung-hitungan angka pembagian sembako, uang, maupun barang, menjelang hari H pemilihan, tanpa mempertimbangkan target dan kebutuhan masyarakat, dan banyak pula caleg yang hanya mengandalkan nama besar pribadinya maupun keluarganya (mantan pejabat, anak pejabat, dll) tanpa memperhatikan persentase tingkat kesukaan tingkat atau tingkat penerimaan masyarakat, bahkan tak sedikit pula, ada calon anggota legislative berani menggunakan jasa konsultan politik (lembaga survei) yang dibayar mahal untuk memuluskan langkah mereka duduk di lembaga legislative meskipun tak ada jaminan pasti untuk terpilih menjadi anggota legislative.

Tak bisa dipungkiri bahwa paradigma berfikir masyarakat kita selama cenderung terjebak pada asumsi bahwa hanya Caleg yang memilih persiapan “uang banyak” yang paling berpotensi terpilih menjadi anggota legislative, sementara yang tidak memilih “duit” atau hanya yang memiliki “duit” pas-pasan, hampir dipastikan gagal, padahal kegagalan seorang Caleg dalam Pemilu legislative sangatlah ditentukan oleh strategi kemenangan yang digunakan. Memang, setiap H.arifin Nainggolan, SH, M.Si yang maju pada pemilu legislative

2014 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1 yang memiliki daerah pemilihan Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Barat, Medan Helvetia, dan Medan Petisah, pastilah sudah menyiapkan sejumlah strategi pemenangan yang siap dijalankan, akan tetapi ada strategi pemenangan tersebut hanya disusun berdasarkan logika-logika sederhana tanpa menggunakan data-data pendukung sebagai pijakan awal untuk melahirkan sebuah konsep yang diwujudkan menjadi pola dan strategi pemenangan.

H. Arifin Nainggolan, SH, M.Si dalam pendulungan suara tentunya memiliki dan menguasai pemetaan politik. Target Politik, Posisi Politik serta memiliki bauran produk politik. Apabila ini mampu dikuasai salah satu kandidat politik maka dalam hal meraih suara pastinya bisa tercapai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi Calon Legislatif Dalam Meraih Suara Pada Pemilu 2014 (Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Banyaknya para calon legislatif dengan cara menggunakan berbagai cara untuk meraih suara terbaik itu secara lewat media, pendekatan terhadap ormas masyarakat.

2. Sebagian besar para calon legislatif dalam menggunakan money politik dalam meraih suara mengingat masyarakat sudah mampu membaca situasi keadaan perpolitikan Indonesia saat ini.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Strategi Calon Legislatif Dalam Meraih Suara Pada Pemilu 2014 (Studi Deskriptif Kualitatif Partai Demokrat Dapil 2 Sumut Nomor Urut 1”).

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi melalui segmentasi politik yang dilakukan oleh Calon Legislatif No. Urut 1 dalam meraih suara.
2. Sejauh mana Target Politik dan Posisi Politik yang dilakukan oleh calon Legislatif No. Urut 1 dalam meraih suara.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

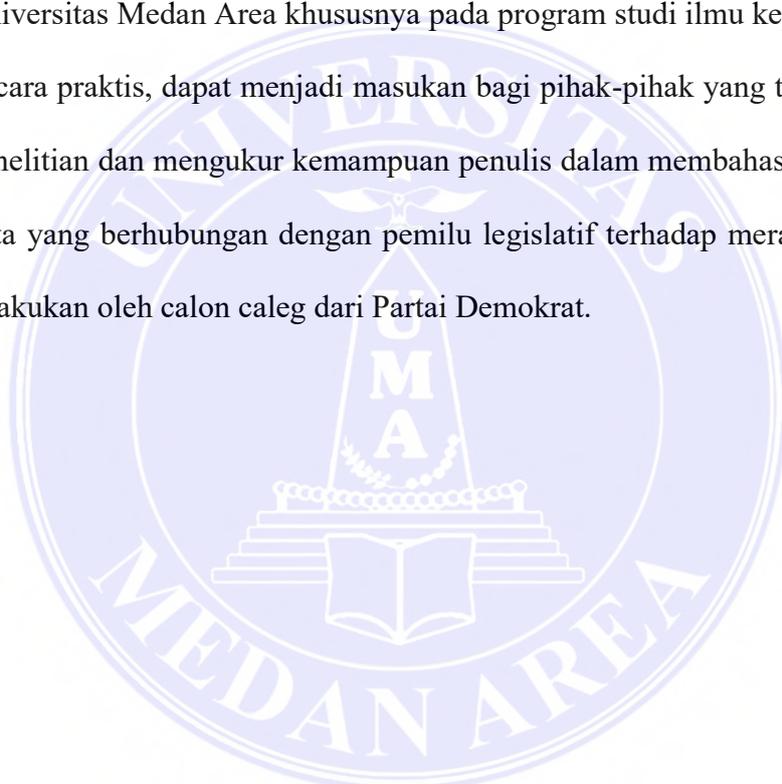
Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi melalui segmentasi politik yang dilakukan oleh Calon Legislatif No. Urut 1 dalam meraih suara.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Target Politik dan Posisi Politik yang dilakukan oleh Calon Legislatif No. Urut 1 dalam meraih suara.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai strategi caleg dalam meraih suara dan menambah referensi khususnya bagi para Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya pada program studi ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan pemilu legislatif terhadap meraih suara yang dilakukan oleh calon caleg dari Partai Demokrat.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Strategi

Menurut Budiardjo (2011) Kata “Strategi” adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategis. Adapun strategis dapat diterjemahkan sebagai ‘komandan militer’ pada zaman demokrasi Athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan tentang pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampurkan kedua kata tersebut. Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, “Strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan dengan taktik untuk memenagkan satu pertandingan”.

Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll.

Strategi adalah :

1. Kiat yang digunakan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi secara keseluruhan.
2. Melalui serangkaian aktivitas yang unik atau berbeda dari yang lain dan terus menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai.
4. Ditopang dengan saran dan prasarana.
5. Dikendalikan oleh seorang pemimpin.

Pemimpin sejati bukanlah orang yang cuman bisa memimpin, tetapi pemimpin sejati adalah orang yang bisa membuat orang-orang yang dipimpinnya menjadi pemimpin pula. Tingkat penentu kebijakan dalam pemerintah :

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastuktur politik, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interenst group) dan kelompok penekan (pressure group). Interenst dan infranstruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dan hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sida`ng MPR yang setelah pelantikan dan mengambil sumpah dan janji

Presiden/Wakil Presiden. Visi dan Misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.

Menurut Leo Agustino (2007) Stratifikasi Tingkat penentu kebijakan politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penentu kebijakan pusat

Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara tradisional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitik beratkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara dapat berupa dekrit, peraturan atau kepala negara.

2. Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang tingkatnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan tingkat di atasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam suatu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

5. Tingkat penentu kebijakan di daerah

Wewenang penentu kebijaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak pada Gubernur dan kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atau WaliKota/Kepala Daerah tingkat II.

Menurut Budiarjdo (2011) Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antar berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusioanal maupun konstitusioanal.

Di samping itu Politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain :

1. Politik adalah usaha lain yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
5. Konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani Politeia (berarti kiat pemimpin kota (polis)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan kenapa dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa (kekuasaan) tidak akan terjadi misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan untuk adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka.
6. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang

melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik.

7. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (*authority*), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan tetapi ia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenang melaksanakan kewenangnya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan maka ia telah menyalah gunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.
8. Perilaku politik atau (*Inggris: Politik Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah :
 - a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin.
 - b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti suatu ormas atau organisasi masyarakat atau ISM lembaga swadaya masyarakat.
 - c. Ikut serta dalam pesta politik.
 - d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
 - e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik.

- f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.

2.1.1. Pemilihan Umum Legislatif

Menurut Anta Venus (2004) pada tahun 2014, Pemilu Legislatif di Indonesia, sebagai salah satu implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang kita anut. Pada saat ini tahapan Pemilu telah memasuki tahapan pendaftaran di KPU (Pusat dan Daerah). Pernyataannya adalah apakah tujuan kita hanya sebatas melaksanakan demokrasi ekonomi, sebagai konsekuensi diaduknya juga prinsip negara hukum kesejahteraan. Kekhawatiran saya adalah kita berhenti pada titik pencapaian demokrasi politik, sehingga demokrasi ekonomi menjadi terabaikan. Seolah-olah satu-satunya demokrasi adalah demokrasi politik, tidak ada demokrasi lain.

Secara teoritis terdapat hubungan yang erat antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Seperti dikatakan oleh J.J. Rousseau, dalam bukunya “Du Contrat Social”, dalam teori fisiknya mengenai perjanjian masyarakat dinyatakan bahwa dalam suatu Negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty, dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai hal tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak terbanyak. (Hendra Nurjahyo : 2008). Berdasarkan pendapat tersebut, maka kedaulatan rakyat (demokrasi), merupakan sarana untuk mencapai kepentingan orang banyak, salah satunya adalah kepentingan ekonomi.

Menurut Hendra Nurtjahyo (2008) membedakan secara tegas esensi semokradi Barat sebagaimana yang digagas oleh J.J. Rousseau dengan konsep kedaulatan rakyat ala Indonesia “Demokrasi Barat yang dilahirkan oleh revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kapitalisme, sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Hauslah adapula demokrasi ekonomi yang memakai dasar bahwa segala pengasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku dibawah tanggungan orang banyak juga”.

Menurut Bagir Manan (2002), menjelaskan esensi demokrasi secara lebih rinci: “dimanapun dan kapanpun demokrasi semestinya mengandung atau menunjukkan beberapa esensi yang tidak dapat ditawar, yaitu : kebebasan (liberty) dan persamaan (equality), baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu dimensi politik dari demokrasi adalah kebebasan dan persamaan untuk berpartisipasi baik sebagai pelaksana (governing) maupun sebagai pengawas dan pengendali (controlling, directing) penyelenggara Negara atau Pemerintah. Dari sudut ekonomi sosial dan budaya, demokrasi mengandung hak rakyat mendapatkan keadilan dan kemakmuran sosial yang seluas-luasnya”.

Menurut Hendra Nurtjahyo (2008) berdasarkan pendapat Moh. Hatta dan Bagir Manan, dapat dipahami bahwa esensi Demokrasi, tidak hanya dalam perspektif politik semata, tetapi juga dari perspektif ekonomi. Dihubungkan dengan konsepsinegara hukum kesejahteraan yang juag dianut Indonesia, maka hak- hak rakyat untuk mendapat menjadi esensi yang tidak kalah

penting, artinya demokrasi politik, harus menunjang terwujudnya demokrasi ekonomi, jika tidak maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Hendra Nurtjahyo : “sepanjang demokrasi hanya dipahami dalam batas-batas rasionalitas kedaulatan mayoritas suara rakyat semaka, maka demokrasi akan selalu diartikan sebagai pembenaaran atas kekuasaan: sebagai representasi rezim elit oligarkis, dengan menggunakan hukum sebagai alat legitimitasi dan alat untuk memobilisasi rakyat. Demokrasi dapat menjadi praktis yang senantiasa mempunyai peluang untuk memberlakukan hal-hal yang tidak adil, tidak etis serta pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam demokrasi yang demikian, hukum tidak menempatkan moralitas didalamnya, dan hukum hanya akan menjadi tukang pukul setia bagi kelompok oligarki yang berkuasa atas nama mayoritas”.

Pemilu legislatif (demokrasi politik) merupakan variabel antara untuk mencapai peningkatan kualitas demokrasi ekonomi, apabila anggota legislatif terpilih memenuhi kriteria yang diharapkan, seperti : Pertama, secara moral/etik memiliki kejujuran, komitmen, konsekwen, konsisten dan bertanggung jawab terhadap kepentingan orang banyak, secara akademik mempunyai modal minimal, sehingga dengan modal minimal memahami aspek-aspek kebijakan publik pembuatan peraturan perundang-undangan, aspek tugas dan fungsi legislatif lainnya sehingga mempunyai wawasan kenegaraan dan kelokalan.

Dalam Teori Rousseau, kehadiran legislator diharapkan mampu meminimalisir kecenderungan penguasa pada *volonte particular* (kepepentingn pribadi) dan *volente de corp* (kepentingan kelompok) dan menggiring kecenderungan umum (*volente generale*). Untuk melakukan tugas itu, tidak ada cara lain selain memenuhi standar diatas.

Kenyataan saat ini, menunjukkan bahwa mayoritas produk demokrasi politik (legislator), belum menggambarkan performance yang diharapkan. Kebanyakan masih sangat royal dengan kepentingan partai politiknya (volente de corp) dan kepentingan pribadi (volente particular). Keroyaln terhadap kepentingan umum masih perlu dipertanyakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kebijakan penguasa yang kurang bermanfaat untuk rakyat yang belum mampu diminimalisir oleh para legislator. Bahkan ada kecenderungan melalui Banggar. Legislator menggiring/melakukan pressure kepada penguasa untuk mencapai volente de corp dan volente particularnya.

Dalam kondisi seperti ini, maka pencapaian demokrasi yang dapat kita capai hanyalah sebatas demokrasi politik formil. Belum mencapai demokrasi politik substansi. Sehingga perwujudan dari demokrasi ekonomi masih perlu diperjuangkan. Fakta menunjukkan walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat pesat, namun pertumbuhan itu hanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak diharapkan. Pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh pertumbuhan investasi besar, sementara pertumbuhan investor besar berjalan lamban. Konsumsi masyarakat lebih di dominasi oleh konsumsi masyarakat perkotaan, yang merupakan sebagian terkecil warga negara ini. Jadi pemerataan kesejahteraan rakyat masih sangat perlu diperjuangkan.

2.1.2. Tahap – Tahap Pemilihan Umum Legislatif

Tahap-tahap pemilihan umum legislatif adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pemilih

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata calon pemilih yang akan menggunakan haknya dalam pemilu. Pendaftaran pemilih dilakukan

dengan beberapa hal penting, seperti : nama lengkap, status perkawinan, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal.

2. Pendaftaran peserta Pemilu

Kegiatan ini adalah kegiatan dimana para peserta mendaftarkan diri/parpolnya. Untuk administrasi, seluruh parpol mendaftar di departemen kehakiman dan HAM. Sedangkan untuk perorangan mendaftarkan langsung ke KPU DKI Jakarta.

3. Penetapan Peserta Pemilu

Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari pendaftaran peserta pemilu. Dalam tahapan ini KPU telah melakukan penelitian mendalam tentang persyaratan para calon peserta pemilu. Tahapan ini merupakan keputusan akhir KPU yang bersifat final (tidak dapat diganggu gugat) dalam menilai suatu parpol layak mengikuti pemilu. Sedangkan untuk DPRD, jumlah peserta tergantung pada daerah pemilihan.

4. Penetapan Jumlah Kursi

Sesuai dengan UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu. KPU berwenang untuk menetapkan jumlah dan alokasi kursi untuk masing-masing daerah pemilihan, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

5. Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPRD

Pencalonan DPR, DPRD sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing parpol kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Anggota DPRD dilakukan pada KPU tingkat nasional, sedangkan DPRD pada tingkat Provinsi. Khusus untuk DPD, pencalonan dilakukan secara langsung pada kantor KPU tingkat Provinsi.

6. Kampanye

Seluruh peserta pemilu, baik parpol maupun perseorangan yang telah sah berhak melaksanakan kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kampanye berbentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran informasi kepada khalayak umum, dan pemasangan alat peraga ditempat umum, dll.

7. Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

Ada beberapa tahapan tata cara proses pemungutan suara di seluruh YPS.

Adapun tahapannya sebagai berikut :

- 1) Pembukaan tempat pemungutan suara
- 2) Pemungutan suara
 - a) Pemilih mendatangi kerja petugas registrasi dan menunjukkan kartu pemilihnya.
 - b) Pemilih dapat mengambil kertas suara selanjutnya masuk kebilik suara
 - c) Setelah mencoblos, pemilu memasukan kertas suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara
 - d) Setelah memasukkan kertas suara, selanjutnya pemilih meninggalkan lokasi dengan diberikan tanda pengenal telah memilih disalah satu jari dipintu keluar TPS.

2.2. Realisasi Strategi Politik

Strategi pemenangan kandidat Caleg No. Urut 1 meliputi tiga tahap yaitu tahap segmentasi pasar politik, tahapan tergeting politik, dan tahapan positioning politik kandidat. Ketiga tahapan strategi ini, dimaksudkan agar kandidat dapat hadir kedalam karakteristik masyarakat pemilih kemudian memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat pada setiap segmen pemilih dan merealisasikan dalam bentuk program kerja partai, sehingga walaupun dengan sumber daya terbatas seorang kandidat dapat memaksimalkan perolehan suara pada daerah pemilihannya. Pemasaran politik dari segi Strategi Politik Kandidat Legislatif dalam memenangkan anggota DPRD Dapil Sumatera Utara II ditemukan, sebagai berikut:

1. Kandidat Legislatif melakukan kegiatan perawatan pemilih pada pemilu sebelumnya sebagai basis massanya.
2. Mayoritas pemilih yang mendukung kemenangan kandidat adalah segmen pemilih yang berbeda etnis, agama dan pekerjaan dengan kandidat. Namun demikian, masih ada kandidat kecil pemilih memilih karena persamaan agama dan etnis.
3. Segmentasi, tergeting dan positioning serta bauran produk politik meningkatkan cita diri dan cita partai politik dilakukan jauh-jauh hari sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
4. Pada putaran pertama tahapan ketentuan PBB, tidak ada satupun kandidat legislatif menang mutlak untuk memperoleh satu (1) kursi di DPRD Dapil Sumut II. Semua kandidat lolos ke DPRD setelah melalui beberapa tahapan ketentuan PBB yang di tetapkan KPU Sumatera Utara.

2.2.1. Realisasi Politik

Budiardjo (2004) Bauran Produk Politik direalisasikan dengan mengidentifikasi: *policy, person, party, dan presentation*. Bauran produk politik yang memegang peran penting bagi kemenangan kandidat legislatif Perahanan di Dapil II Sumatera Utara pada pemilu Tahun 2004 yaitu dari segi substansi produk politik: aspek figur kandidat dan aspek partai politik. Sedangkan dari segi *presentation* produk politik: even atau peristiwa politik.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Dapil SUMUT II merupakan kantong berbasis Agama naun yang terjadi adalah: ada kandidat legislatif beragama Islam menang dikantong Kristen, dan sebaliknya juga, ada kandidat legislatif *Dapil Sumut II* beragama Katholik dan Muslim justru menang pada berbasis agama Protestan, Islam yang berbeda etnis cengan kandidat. Dengan demikian faktor mayoritas agama dan etnis berpengaruh kecil terhadap kemenangan legislatif.

Kemenangan legislatif DPRD Dapil II Sumut dari segi Bauran Produk Politik kandidat legislatif pada pemilu anggota DPRD Dapil Sumatera Utara Tahun 2004, ditentukan bahwa: aspek *ferson/figur* kandidat legislatif dan aspek partai politik (persetujuan partai untuk mencalonkan kembali kader partai terbaiknya. Melainkan memegang peranan penting dalam memenangkan kandidat.

Hal ini daikarenakan kandidat mampu membangun relasi yang baik dengan pemilih yang ditarget sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis dan agama, kandidat cepat respon terhadap kebutuhan dasar masyarakat pemilih dan konsisten pada janji politiknya. Selain itu juga kandidat legislatif juga mendapat persetujuan partai politik dari partai untuk mencalonkan

diri kembali dengan periode pemilu berjalan. Akumulasi dari ketiga unsur diatas terlihat yang akan dilakukan penelitian yang membuktikan bahwa Daerah Pemilihan Sumut II merupakan kantong asra Nasrani namun yang terjadi adalah: ada calon legislative yang beragama Islam menang di kantong Kristen, dan sebaiknya juga, ada kandidat legislatif beragama Katholik dan beretnis Jawa dan China.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Utara memilih wakil rakyatnya bukan semata-mata karena kesamaan SARA namun karena aspek figur kandidat dan aspek partai politik serta even politik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pemilih. Disamping itu, kandidat juga mampu membangun relasi yang baik dengan pemilih yang ditarget sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis dan agama, andidat cepat respon terhadap kebutuhan dasar masyarakat pemilih dan konsisten pada janji politiknya, serta kandidat mendapat persetujuan politik untuk mencalonkan diri kembali dalam periode pemilu berjalan. Hal hal inilah yang menjadi faktor penentu kemenangan kandidat legislatif dari segi bauran produk politik pada pemilu anggota DPRD Dapil II Wilayah Sumatera Utara Tahun 2014.

2.2.2. Strategi Politik Untuk Memenangkan Pemilu

Alfan Alfian (2008:302-304) politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerja sama pada pihak lain. Oleh karena itu, kita perlu mengenal sebelas strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu: *strategi defect, strategi cooperate, strategi random, strategi per kind, strategi per nasty, strategi spite, strategi soft majority, strategitit for tat, strategi mistrust, strategi*

prober, dan strategi pavlov. Berikut dibawah ini berbagai tata cara strategi dalam perpolitikan :

1. Strategi Defect, Strategi “*Defect*” adalah menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. “*Defect*” merupakan sebuah strategi yang sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerja sama secara buta, namun sekaligus mengejar sasaran. Jelas terlihat bahwa “*Defect*” tidak dapat dikalahkan, tidak ada strategi lain yang apabila dibandingkan secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan “*Defect*”, karena lawan hanya dimungkinkan untuk memperoleh hasil bekerja sama atau tidak bekerja sama.
2. Strategi Cooperate, Strategi “*Cooperate*” adalah strategi yang menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Strategi merupakan lawan dari strategi “*Defect*” dan memiliki sifat-sifatnya yang berlawanan. “*Cooperate*” tidak dapat menang karena ia hanya bisa mencapai beberapa poin atau tidak memperoleh poin, dimana dalam kasus ini poin yang diperoleh tidak dapat lebih banyak dari pada poin lawan. Apabila lawan mau kerja sama, maka strategi ini tidak akan merugikan, namun karena strategi buta ini, “*Cooperate*” sangat mudah ‘dimanfaatkan’.
3. Strategi Random, Strategi “*Random*” adalah strategi yang posisinya ditengah-tengah menerima atau menolak. Contohnya, lemparlah uang logam, undilah kalau dapat sisi A berarti anda harus bekerja sama dan kalau dapat sisi B sebaliknya. “*Random*” memainkan “*Defect*” atau “*Cooperate*” dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang bertujuan melakukan kerja sama secara permanen dapat berhasil dengan menggunakan langkah “*Random*”. Jadi, apabila strategi ini tidak dimainkan secara buta, ia tidak

akan mudah bekerja sama. Dengan demikian, adalah mustahil untuk mencapai secara konsisten.

2.2.3. Teori Segmentasi (Pemetaan) Politik

Firmanzah (2008) Segmentasi pasar politik dikaukan dengan cara menidentifikasi dasar segmen pemilih dan menyusun profil dari hasil segmentasi pemilih. Adapun hasil identifikasi dasar pemilih didasarkan pada hasil perolehan suara pemilu sebelumnya guna melakukan perawatan pemilih dengan cara menjalin kedekatan hubungan dengan konstituen dan konsisten pada janji politik serta mempererat hubungan kekerabatan dan keluarga, kenalan dan sahabat pada daerah pemilihannya. Segmentasi pemilihan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pemilih dan menyusun profil pemilih yang mendukung pada pemilu sebelumnya dan pada pemilu sekarang.

Kandidat membuat segmentasi pemilih berdasarkan segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografi, segmen perilaku, dan segmen sosial budaya. Bahwa segmen pemilih berdasarkan psikografi dan sosial budaya (pendekatan budaya) sangat memainkan peran penting dalam memenangkan anggota legislatif Dapil Wilayah Sumut II. Pemetaan dengan cara geopolitik sangat penting menggambarkan keadaan politik suatu wilayah, yaitu suatu tempat atau daerah pemilihan bagi calon walikota/bupati ataupun calon legislatif. Pemetaan geopolitik dilakukan untuk mendapatkan informasi kondisi politik suatu wilayah yang diantaranya, populalitas dan elektabilitas seorang figur politik, mengetahui pilihan partai politik masyarakat, bentuk-bentuk kegiatan

masyarakat yang digandrungi, usia pemilih yang dikaitkan dengan pilihan politiknya juga latar belakang pekerjaannya.

Data tersebut akan terpapar lengkap secara geopolitik menggambarkan wilayah politik yang akan digarap demi sebuah kemenangan politik. Untuk mendapatkan gambaran politik suatu wilayah tersebut maka hal pertama yang harus dilakukan adalah survey politik, survey inilah yang akan memberikan gambaran itu secara matematis. Langkah awal melakukan survey adalah menyiapkan sebuah perangkat survey dan milau quastioner, alat bantu pemilihan pertanyaan, menyediakan surveyor dan system survey yang berjalan. Selanjutnya, melakukan pelatihan bagi surveyor sebelum turun dilapangan hingga melakukan survey dilokasi yang akan digambarkan kondisi geopolitiknya.

Kondisi diatas, menunjukkan ternyata tidak sepenuhnya mendapat Nursal benar yang menekankan bahwa *faktor agama, aspek geografis (kedaerahan), dan faktor kelas atau status ekonomi (khususnya di Negara Negara maju) memang mempunyai korelasi nyata dengan perilaku pemilih*, sebab dalam realitas yang terjadi, mayoritas pemilih di daerah pemilihan Sumut II adalah Batak Muslim dan Nonmuslim serta etnis lainnya seperti Jawa, Padang serta turunan tionghoa dimana kandidatdikarenakan tersebut mampu membangun kedekatan hubungan emosional dengan pemilih dan cepat respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar pemilih maupun konstituennya.

2.2.4. Teori Target Politik

Menurut Nursal (2004) Kandidat tidak dapat meraih seluruh suara pemilih yang ada dalam daerah pemilihannya. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan kelompok pemilih sebagai kelompok sasaran yang dapat mendukung kemenangannya. Pada umumnya targetting politik yang dilakukan oleh para anggota legislatif terpilih DPRD Dapil Sumut II Tahun 2014 lebih memilih kelompok masyarakat yang berfalisiasi dengan artai politik yang menjadi kendaraan politik pada saat pemilu. Cara ini dilakukan sangat efektif untuk memperoleh suara dalam memenangkan pemilu anggota DPRD Dapil 2 Sumut.

Bentuk riil dari berfalisiasi dengan partai politik terlihat dari komitmen pengurus partai politik, komitmen dari saksi dan kefanatikan simpatisan partai yang mendukung kandidat legislatif dalam pencoblosan suara saat pemilu legislatif berlangsung. Kandidat legislatif yang berada pada Dapil (daerah pemilihan) II lebih memfokuskan pemilih sebagai target kemenangannya.

Dalam mengidentifikasi peluang segmen, pasar selanjutnya adalah mengevaluasi bermacam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target politik. Dalam mengevaluasi pemetaan politik yang berbeda pihak partai harus melihat dua faktor yaitu daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan reseed partai. Partai harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, protabilitas, skala ekonomi, resiko yang rendah dan lain-lain. Partai juga perlu mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal

dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya partai. Pada saat mengevaluasi dan menentukan segmen mana yang akan dijadikan target. Pertama, perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan dapat saja memilih segmen yang kecil pada saat sekarang namun segmen itu mempunyai prospek menguntungkan dimasa datang. Sehubungan dengan hal ini perusahaan harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang menandai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih sehingga memberikan value bagi konsumen. Untuk menghasilkan value yang unggul tidak cukup hanya memiliki sumberdaya yang memadai tetapi harus didukung dengan kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitif untuk melaksanakan diferensiasi yang ditunjukkan untuk memenangkan kompetensi tersebut. Partai politik juga harus menganalisis dari dekat apakah segmen pasar yang dipilih telah sejalan dan mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Ketiga adalah bahwa segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingannya. Perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi gaya tarik targeting perusahaan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan disini antara lain intensitas persaingan segmen, potensi masuknya pemain baru, hambatan masuk industri, keberadaan produk-produk pengganti, kehadiran produk-produk komplementer serta pertumbuhan kekuatan tawar menawar pembeli maupun pemasok. Dengan menggunakan beberapa kriteria diatas perusahaan dapat

menemukan kesesuaian perusahaan dengan segmen pasar yang tepat. Targetisasi Pasar Politik langkah strategis yang diambil adalah dengan cara:

1. Menyusun kriteria pemilihan segment pemilih
2. Memilih target segmen pemilih

2.2.5. Teori Partai Politik

Menurut Firmazah (2008) setelah kelompok target ditetapkan maka kandidat harus memosisikan dirinya sebagai kandidat yang memiliki nilai lebih dibanding dengan kandidat lainnya agar dapat menjadi daya tarik tersendiri. *Positioning politik* yang dilakukan oleh anggota legislatif terpilih DPRD Dapil II Sumut tahun 2014-2019 didasarkan pada hasil segmentasi pemilih dibuat kriteria dan profil pemilih yang dijadikan pedoman bagi kandidat legislatif untuk menetapkan target pasar politik (pemilih) yang dapat mendukung kemenangan kandidat. Guna mendukung kemenangannya, seorang kandidat harus meminimalisir strategi *polisitioning* polotik dengan cara membaurka produk politik yang menonjolkan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari: posisi kandidat di partai politik, kemampuan kandidat memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, posisi kandidat berdasarkan atribut tertentu dan posisi kandidat kompetitornya.

Strategi pemasaran politik meliputi segmentasi politik, *targeting* politik dan *positioning* politik serta membaurkan produk politik, dianggap cocok dengan hasil penelitian, dimanapun kandidat melakukan strategi segmentasi politik untuk memetakan pemilih sesuai dengan karakter pemilih agar dapat membantu kandidat untuk mendulang suara bagi kemenangannya. Hal ini harus diperkuat kandidat dengan membaurkan produk politik berupa *policy*, *person*, *party*, dan

presentasi produk politik agar benar-benar dapat dipahami pemilih sebagai sesuatu yang berbeda dan bermutu dalam image politik pemilih.

Dalam menentukan positioning ada empat tahap yaitu: identifikasi target, menentukan *frame of referece* konstituen (siapa diri), merumuskan *poin of differentitation* – Mengapa konsumen memilih perusahaan, menetapkan keunggulan kompetitif produk – bisa dinikmati sebagai sesuatu yang beda (Kotler, 2003) Menurut Kotler, Kartajaya, Huan dan Liu 2003 ada empat kriteria yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat menentukan posisi politik. Pertama adalah kajian terhadap konstituen karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Selain itu, positionng merupakan penentu penting bagi konstituen pada saat memutuskan untuk membeli. Berbagai langkah strategis dalam Positioning Pasar Politik adalah:

1. Menyusun strategi positioning disetiap segment
2. Menyusun bauran marketing disetiap segmen

2.2.6. Bauran Politik Kandidat Legislatif Dapil II SUMUT

Bauran Produk Politikdirealisasikan dengan mengidentifikasi: *policy, person, paty, dan presentation*. Bauran produk politik yang memegang peran penting dala pemasaran politik bagi kemenangan kandidat legislatif Dapil Sumut II pada pemilu Tahun 2014 yaitu *aspek person/figur* kandidat dan aspek partai politik (berkenaan dengan persetujuan partai dan nama besar partai).

Dalam bauran politik dari segi Bauran Politik kandidat legislatif pada pemilu anggota DPRD Dapil Sumut II Tahun 2014, ditemukan bahwa faktor pendukung kemenangan kandidat legislatif pada pemilu Tahun 2014 dikarenakan kandidat mampu membangun relasi pemilih yang baik dengan yang ditarget sebagai kantong kemenangan tanpa memandang unsur etnis dan agama. Selain itu, kandidat cepat respon terhadap kebutuhan dasar masyarakat pemilih dan kandidat juga konsisten pada janji politiknya, hasil penelitian ini cocok dengan teori dimensi kualitas kandidat yang dikemukakan Nursal bahwa: Candidate personality mengacu pada sifat-sifat pribadi yang dianggap penting yaitu karakter yang artikulatif, welas-asih, stabil, energi, jujur, tegar. Jadi kualitas pribadi yang dimaksudkan disini berkaitan dengan integritas, ketegasan, ketaatan, norma agama dan aturan, kebaikan, merakyat, konsisten pada janji, dan sebagainya.

1. Kandidat dalam baur politik dan penyelenggaraan pemilihan umum, maka dapat kita artikan kandidat dalam partai politik adalah seseorang yang ditokohkan atau dianggap kompeten untuk dapat menggalang massa guna meningkatkan elektabilitas partai dimana ia haruslah berkompeten dalam urusan perpolitikan yang nantinya akan maju sebagai perwakilan partai dalam perebutan kekuasaan dipemilihan umum.
2. Dalam hal ini saya menyikapi hal bagaimana seorang kandidat itu dipilih oleh sebuah partai, dan kondisi yang ada dapat saya analogikan bahwa ada sekurang-kurangnya 3 pertimbangan yang digunakan partai politik dalam memilih calon kandidatnya, pertama segi popularitas . daalm hal ini dapat kita saksikan fenomena para artis ibikota yang beralih pekerjaan menjadi wakil rakyat atau yang tiba-tiba maju dalam perebutan kursi di salah satu

- daerah pilihan di Indonesia itu. Dalam kasus ini dapat kita analogikan bahwa partai politik menilai artis-artis tersebut menjadi calon mereka tas dasar popularitas yang mereka miliki. Yang kedua, segi ekomomi. Dalam hal ini partai politik menilai seorang calon dilihat dari segi ekonomi atau finansial dengan harapan kandidat tersebut dapat memberikan kucuran dana bagi partai dalam pelaksanaan kegiatannya dan untuk memperingan biaya operasional ataupun kampanye, biasanya mereka menggaet pengusaha-pengusaha guna mendapatkan keuntungan materiiil dari mereka.
3. Yang ketiga skiil, bila memiliki tentang segi ini sangatlah miris kita menyaksikannya, karena segi ini sering kali diabaikan, kebanyakan partai lebih mementingkan popularitas dan segi ekonomi dalam segi pemilihan kader atau kandidatnya. Hal ini pulahlah yang membuat kaderisasi dalam kubu partai menjadi tidak sehat.
 4. Kandidat adalah calon pemimpin kita, maka kan baik sekiranya jika penilaian kandidat tidak dinilai dari segi popolaritas dan kekayaan kandidat itu, tetapi kepemimpinan yang baik dan bijak. Untuk itu disini saya akan menyajikan seperti apa kandidat itu seharusnya jika kita mengkorelasikannya dengan makna kandidat sebagai seorang pemimpin. Disini saya akan meyajikan beberapa kriteria yang seyogjianya dimiliki seorang kandidat sebagai seorang pemimpin.
 5. Harus memahami aspek keIndonesian dengan sempurna mulai sejarah dan kebudayaannya, termasuk perkembangan kemasyarakatan yang meliputi harapan dan kekuatan ekonominya demi membangun cita-cita kemakmuran rakyat. Dapat meletakkan sistem kenegaraan sesuai mandat

UUD 1945 yang berkiblat pada pembangunan-pembangunan kemajuan bangsa, dengan diiringi berbagai perbaikan permasalahan nasional melalui visinya yang berkeadilan dalam prorakyat.

6. Orang yang sanggup mengenal baik sejumlah keunggulan lokal milik bangsa beserta keberagamannya, untuk kemudian ditransformasikan sebagai aktualitas kehidupan masyarakat secara produktif dan terhormat. Dalam pengertian ini, hasrat keberagaman harus ditampilkan dalam semangat dan kerjasama harmoni antar masyarakat, sehingga tidak menimbulkan benturan yang bisa mengganggu kesatuan.
7. Pemimpin Indonesia harus mendasarkan adanya dinamika pergaulan internasional terkait peranan bangsa, untuk membawa Indonesia tidak saja sejajar dan dihormati bangsa-bangsa lain, tetapi juga mampu menghadirkan posisi pengayom melalui kepantasan hubungan antar bangsa yang saling membutuhkan.
8. Indonesia memerlukan corak pemimpin yang bergerak cepat untuk memadukan potensi sumberdaya unggul dari bangsa sendiri, agar berlimpah SDA-nya diorientasikan bagi kepentingan dan sebesar-besar kemakmuran bangsa.
9. Dalam bidang ekonomi, pemimpin diisyaratkan dengan gagasan atau azas kerakyatan dalam keputusan ekonomi pemerintah. Karenanya, pemimpin ke depan harus berani menghidupkan azas kerakyatan demi pemerataan dan pertumbuhan pembangunan yang nantinya akan dirasakan oleh rakyat-rakyat Indonesia itu sendiri.

10. Pemimpin harus memunculkan tegaknya aspek pelayanan birokrasi pemerintah dalam orientasi pelayanan publik yang prima
11. Berlatar belakang jejak bersih, atau tidak berjiwa korupsi, mengedepankan kejujuran, serta cermin seorang pemimpin dengan keshalihan individual yang diidamkan rakyat.
12. Seorang pemimpin bangsa adalah sosok yang terbuka dalam menerima masukan dan kritik untuk ditindak lanjuti kearah perumusan kebijakan yang menguntungkan publik, namun pada sisi lain ia juga harus pribadi yang tegas dalam menjalankan kebijakan diamanatkan kepadanya.
13. Menggambarkan perjalanan negara berikut pemerintahan bagi pendidikan pendewasaan rakyat, sembari memutuskan tidak semua kehendak rakyat dapat dipenuhi.
14. Menyelenggarakan efektivitas demokrasi dalam tahapan berkemajuan, yang diselaraskan untuk memperkuat basis kultural bangsa dalam setiap keputusan-keputusannya.

2.3. Kerangka Berfikir

Mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu difikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik. Dalam meraih suara harus memiliki dan menguasai segmentasi politik, target politik, posisi politik, serta memiliki bauran produk politik. Apabila

ini mampu dikuasai salah satu kandidat politik maka dalam hal pendulungan suara pastinya bisa tercapai.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Penelitian

Herdiansyah (2010) dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan cara menggunakan deskriptif analisis pada setiap variabelnya serta dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

3.1.2. Sumber data

Herdiasyah (2010) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data skunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain data primer, sumber daya yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs diinternet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.3.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2016 sampai dengan Juni 2016

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nawawi (2005) dalam melakuka penelitian ini, adapun teknik yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relavan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan dalam mencari data dan informasi dimana penelitian dilakuakan secara langsung terjun ke lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
- b. Wawancara (Interview) yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti kepada para pejabat desa yang berwenang dalam memberikan informasi dan masyarakat desa dala menggali informasi dan data yang diperlukan terutama pada Kantor Partai Demokrat.

3.3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan. Dari hasil yang diperoleh akan diinterpretasikan kedalam bentuk diskusi hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, secara teoritis maupun praksis dapat disimpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.

1. Dapat diketahui strategi politik yang dilakukan H. Arifin Nainggolan SH, M.Si menjelang pemilu 2014 sudah cukup, karena H. Arifin Nainggolan SH, M.Si telah memaksimalkan usahanya dalam mendekati diri pada masyarakat. Meskipun baik itu melakukan berbagai kegiatan sosial, menyusun program akar rumput, grebek pasar, dan melalui media, slogan.
2. Prinsip bauran politik terutama menyangkut etika dan moralitas dalam aplikasi bauran politik tak ubahnya seperti dunia bisnis kapitalis beserta implikasinya yang sarat dengan manipulasi informasi. Berkembangnya iklan politik melalui media massa (pers, radio, televisi, dan media cetak lainnya), H. Arifin Nainggolan SH, M.Si, juga mampu mengarahkan massa dan mampu membentuk tim mulai dari tingkat Kecamatan sampai ketingkat Kelurahan.

5.2. Saran

Dibawah ini terdapat beberapa saran yang diberikan penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas dengan skripsi ini yaitu :

1. Hendaknya Calon Legislatif memberikan pelajaran yang baik pada masyarakat dan mampu menjembatani setiap kendala-kendala dalam

menjalankan program-program mulai dari tingkat Kecamatan/Kelurahan. Serta caleg harus mampu menjadi publik figure bagi masyarakat dan mampu mengayomi sesuai janji-janji yang disampaikan saat kampanye.

2. Disarankan kepada seluruh Tim Sukses khususnya yang berasal dari Partai Demokrat mampu membantu tugas-tugas Caleg terpilih sehingga mampu memudahkan visi misi Caleg dan sebagai pemenang dalam pemilu 2014.



DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, Leo. (2004). *Pilihan dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Anselm Strauss & Juliet Corbin. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Alfan Alfian (2008), *Menjadi Pemimpin Politik*, Penerbit: PT. Gramedia

Pustaka.Jakarta

Bagir Manan, (2002), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu*

Negara, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya

Budiardjo, Miriam, 2004, *Demokrasi di Indonesia: Demkrasi Parlementer dan*

Demokrasi Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Burha, Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

Firmanzah. (2008). *Marketing Politik Antara Pemahaman da Realitas*. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia

Herdiansyah, Haris.(2010).*Metodolofi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: salemba

Humanika

Hendra Nurtjahjo, (2008), *Filsafat Demokrasi*, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr, 2007, *Gagasan amandemen UUD 1945 Dan*

Pemilihan Presiden Secara Langsung, Penerbit: PT BIP (Kelompok

Gramedia), Jakarta

J.J. Rousseau, 2002. *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kasali, Renald. (1998). *Membidik Pasar Indonesia Segmentasi, Targeting Positioning*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nursal, Adman. (2004). *Political Marketing, Strategi memenangkan pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Nawawi, Hendari. (2005). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (cet. 11). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Toni, Andrianus dkk. (2006). *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa.

Steinberg, Arnold. (1981). *Kampanye Politik Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Intermedia.

Venus, Antar. (2004). *Manajemen Kampanye Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Merefleksikan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbi Rekatama Media.

Wasesa, Silih Agung. (2011). *Political Branding & Public Relation*. PT. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.